

PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA DESA DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

The Effect of Revenue Sharing Fund (DBH), Special Allocation Fund (DAK), Village Fund and Gross Regional Domestic Product on Poverty in Indonesia

**Rendy Alvaro dan **Ervita Luluk Zahara*

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI
email: *rendy.alvaro@dpr.go.id, **ervita.zahara@dpr.go.id

Abstract

The study aims to analyze the effect of revenue sharing fund (DBH), special allocation fund (DAK), village fund, Gross Regional Domestic Product (GRDP) on poverty at the districts/city in Indonesia. Types of data use secondary data about revenue sharing fund (DBH), special allocation fund (DAK), village fund, Gross Regional Domestic Product (GRDP) in 2015-2018. Data analysis using panel data regression analysis. Result of research found that revenue sharing fund and special allocation fund had no significant effect on poverty. This study also proves village fund and Gross Regional Domestic Product (GRDP) have significant influence on poverty in Indonesia.

Keywords: *Revenue sharing fund; special allocation fund; village fund; Gross Regional Domestic Product; poverty*

1. Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama bangsa yang harus diselesaikan. Berdasarkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, salah satu sasaran pembangunan adalah penurunan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia terus menunjukkan perbaikan dimana dalam kurun waktu 2015-2019 tingkat kemiskinan turun dari 11,22 persen pada Maret 2015 menjadi 9,41 persen pada Maret 2019. Angka kemiskinan tersebut merupakan yang terendah sejak era kemerdekaan Republik Indonesia.

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi dalam menilai apakah pembangunan yang telah dilakukan pemerintah berhasil. Pemerintah daerah berwenang dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta program yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Suparmoko (2002) mengutarakan “semakin mendekatnya pemerintah kepada masyarakat diharapkan pelayanan publik dapat diwujudkan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” Dengan adanya kebijakan Pemerintah dalam TKDD serta pelaksanaan otonomi daerah diharapkan pengentasan kemiskinan dapat lebih terarah karena semakin dekatnya jarak antara masyarakat dengan pemerintah yang berfungsi sebagai penampung aspirasi dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Pemerintah telah mengalokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang salah satu tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu komponen TKDD yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK bertujuan untuk pemerataan akses ke pelayanan dasar masyarakat. Selain itu dialokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih berfungsi untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam (SDA) yang dibagihasilkan, termasuk sebagai pengkoreksi atas eksploitasi SDA selama ini.

Pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sejak tahun 2015, dimana Dana Desa ini juga bertujuan untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di perdesaan. Sebagaimana termuat dalam Nota Keuangan dalam periode 2015-2019, alokasi Dana Desa terus meningkat dari sebesar Rp20,8 triliun pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp69,8 triliun pada tahun 2019. Untuk RAPBN TA 2020 alokasi untuk Dana Desa direncanakan sebesar Rp72 triliun. DAK dan Dana Desa manfaatnya

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga level terendah di desa. Sehingga diharapkan dapat menjadi stimulus peningkatan kemandirian fiskal di daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. Giovanni (2018) telah melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh PDRB, pengangguran, dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Pulau Jawa tahun 2009-2016. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Indonesia. Maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam studi ini yaitu:

1. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap kemiskinan?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kemiskinan?
3. Apakah Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan?
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap kemiskinan?

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Siregar (2015), Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas

daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.2. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut Halim (2001) menyatakan bahwa tujuan dari penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan. Hal ini dikarenakan besarnya tingkat kemiskinan yang ada di daerah.

DAK terdiri dari DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik merupakan instrumen untuk mendanai infrastruktur serta sarana dan prasarana pelayanan publik dan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang menjadi kewenangan daerah dengan memerhatikan prinsip *money follow program*. DAK Fisik terdiri dari DAK Fisik Reguler, DAK Fisik Penugasan dan DAK Fisik Afirmasi. Sedangkan DAK Nonfisik merupakan dana yang dialokasikan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Cakupan DAK Nonfisik telah mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan RAPBN 2020, DAK Nonfisik terdiri atas : (1) Dana BOS, (2) Dana BOP PAUD, (3) Dana tunjangan profesi guru PNSD, (4) Dana tambahan penghasil guru PNSD, (5) Dana tunjangan khusus guru PNSD, (6) Dana BOK, (7) Dana BOKB, (8) Dana PK2UKM, (9) Dana pelayanan administrasi kependudukan, (10) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, (11) Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya, (12) Dana Pelayanan

Kepariwisataan, dan (13) Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).

2.3. Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. (Buku Pintar Dana Desa, 2017). Dana Desa dianggarkan dalam APBN setiap tahun yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan UU Desa, besarnya Dana Desa yang berasal dari APBN ditentukan 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap, yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Besaran alokasi Dana Desa per desa dibangun dari alokasi dasar dan besaran alokasi yang dihitung berdasarkan formula. Alokasi dasar Dana Desa per desa dihitung dengan memperhatikan variabel alokasi dasar per desa dan jumlah desa. Sedangkan variabel yang diperhatikan dalam penghitungan alokasi Dana Desa per desa dengan menggunakan formula adalah jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas wilayah desa dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG).

Dalam kajian KOMPAK (2017) dijelaskan bahwa dari sisi kebijakan, penataan desa baik oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa. Untuk itu, pembangunan desa

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung dari potensi faktor-faktor produksi di daerahnya. Dengan adanya perekonomian suatu daerah yang meningkat maka pertumbuhan ekonomi pada daerah/wilayah tersebut akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin meningkat mempunyai peran penting terhadap kesuksesan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut BPS (2019), data PDRB merupakan statistik pendapatan regional yang dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi hasil pembangunan sekaligus sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan ekonomi di suatu wilayah tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

2.5. Kemiskinan

Konsep kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Kondisi ini terjadi apabila antar kelompok pendapatan menunjukkan fenomena ketimpangan. (Bappenas, 2018).

Chambers (1984) mengemukakan pandangannya tentang kemiskinan khususnya di wilayah perdesaan yaitu kemiskinan merupakan klaster dari berbagai kondisi kurang menguntungkan yang saling berkaitan satu sama lain, dan menyebabkan seseorang terperangkap serta sulit keluar dari kondisi kemiskinan. Menurut World Bank, kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Seperti berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya sarana dan kapasitas memadai, serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik.

2.6. Penelitian Terdahulu

Santosa (2013) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan daerah.

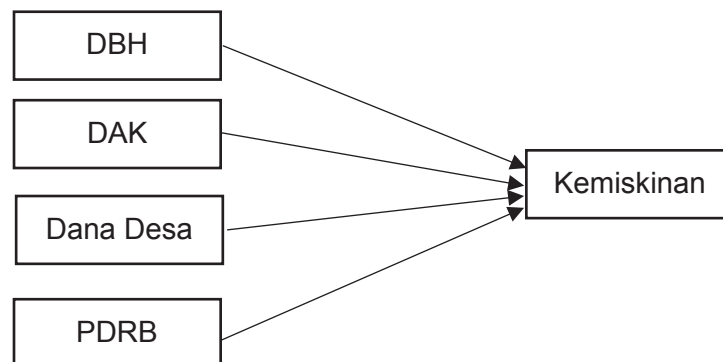
Sari dan Abdullah (2017) melakukan penelitian mengenai analisis ekonomi kebijakan Dana Desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Penelitian tersebut menunjukkan variabel Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2016. Nafiudin (2018) telah meneliti mengenai Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Dana Desa sudah mampu mengurangi angka kemiskinan.

Saskia (2014) menguji pengaruh pertumbuhan pendapatan perkapita, pengangguran dan tingkat pendidikan di Sulawesi Tenggara. Hasil uji regresi yakni antara pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dapat dikatakan berpengaruh negatif dan signifikan. Dimana semakin tinggi pendapatan perkapita maka tingkat kemiskinan tinggi dan memiliki pengaruh secara signifikan. Ulfa (2015) menguji pengaruh PDRB dan PAD terhadap tingkat kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur. Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil PDRB dan PAD signifikan dengan elastisitas negatif terhadap kemiskinan.

2.7. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pendahuluan yang sebelumnya telah dijelaskan serta diperkuat dengan penelitian terdahulu, maka penulis menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah penulis

3. Metodologi

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia. Cakupan penelitian penelitian ini adalah 33 provinsi di Indonesia yang terdiri dari 434 kabupaten/kota dengan series data tahun 2015-2018.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya adalah data runtut waktu (*time series*) yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yakni cara memperoleh data dengan mempelajari dan menyelidiki dokumen-dokumen yang sesuai.

3.2. Model Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah tingkat kemiskinan di Indonesia sedangkan variabel independennya adalah Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Dana Bagi Hasil dan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat bantu *EViews* versi 9.

3.2.1. Perumusan Model

Analisis penelitian ini menggunakan model persamaan regresi data panel. Data panel adalah data yang diperoleh dengan menggabungkan antara data *cross section* dan data *time series*. Berikut rumus regresi data panel jika ditulis dalam fungsi matematis.

$$TK = \beta_0 + \beta_1.DBH + \beta_2.DAK + \beta_3.DD + \beta_4.PDRB + e$$

Penjelasan Simbol :

TK = Tingkat Kemiskinan

β_0 = Konstanta (*intercep*)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
DBH	= Dana Bagi Hasil
DAK	= Dana Alokasi Khusus
DD	= Dana Desa
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto
e	= error

Terdapat tiga jenis teknik dalam menganalisis data panel yaitu model dengan metode *Ordinary Least Squares (Common Effect)*, model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Dan selanjutnya untuk tahap pemilihan terhadap model panel yang telah dihasilkan, terdapat beberapa uji yang dilakukan:

3.2.2. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menguji apakah dua atau lebih regresi yang diuji itu berbeda. Uji Chow ini digunakan untuk memilih model *Pooled Least Squared* dan *Fixed Effect*. Hipotesa dalam uji chow ini adalah:

H_0 : model *Pooled Least Square* (PLS) lebih baik

H_a : model *Fixed Effect* lebih baik.

Kesimpulan dari Uji Chow ini adalah jika hasil prob. > F lebih kecil dari nilai α (5 persen), maka H_0 akan ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain model *Fixed Effect* lebih baik. Sebaliknya, jika hasil prob. < F lebih besar dari nilai α , maka H_0 akan diterima dan H_a ditolak.

3.2.3. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hipotesa dalam Uji Hausman ini adalah:

H_0 : model *random effect* lebih baik

H_a : model *fixed effect* lebih baik

Kesimpulan dari Uji Hausman adalah jika prob dari *Chi-square* > 0,05 maka H_0 diterima model yang digunakan adalah *random effect*. Sebaliknya jika prob < 0,05 maka model yang digunakan *fixed effect*.

3.2.4. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM dilakukan untuk memilih antara *Pooled least Squared* atau *Random Effect*. Hipotesa dalam uji LM ini adalah:

Ho : model *Pooled Least Squared* lebih baik

Ha : model *random effect* lebih baik

Kesimpulan dari hasil pengujian ini adalah jika hasil prob $< \alpha$ (0,05) maka ho ditolak, yang artinya model *random effect* lebih baik, dan sebaliknya.

3.3. Uji Statistik

Berdasarkan hasil dari regresi didapatkan hasil besarnya koefisien determinasi, uji F, dan Uji t.

3.3.1. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Semakin tinggi nilai *R-Squared* berarti model dikatakan semakin baik karena semakin besar keragaman variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh keragaman variabel independen. Nilai *adjusted R-Squared* juga berguna untuk menentukan model terbaik jika penelitian memiliki berbagai alternatif model. Model terbaik yang dipilih berdasarkan nilai *adjusted R-Square* yang terbesar, dengan asumsinya model tidak melanggar kriteria ekonometrik. Nilai R^2 biasanya dinyatakan dalam hitungan persen. Nilai *adjusted R-Squared* berkisar antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$) dimana semakin mendekati 1 maka semakin dekat pula hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat atau dapat dikatakan model tersebut adalah baik.

3.3.2. Uji Simultan (*F-Test*)

Uji F digunakan untuk membuktikan secara statistik bahwa keseluruhan koefisien persamaan regresi signifikan dalam menentukan nilai dari variabel endogen. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap

variabel dependen pada α tertentu. Uji F juga dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan membandingkan F hitung lebih besar dari F tabel atau nilai prob. F lebih kecil dari α terbesar yang digunakan.

3.3.3. Uji Parsial (*T-Test*)

Uji t digunakan untuk membuktikan bahwa koefisien dari masing-masing variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Sama seperti uji F, uji t dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel atau membandingkan probabilitas t dengan α . Variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen jika nilai t hitung lebih besar dari t-tabel atau nilai probabilitas t lebih kecil dari α terbesar yang digunakan.

4. Hasil dan Pembahasan

Pemilihan metode terbaik dalam metode analisis data panel dilakukan dengan pengujian statistik melalui *Chow Test* dan *Hausman Test*.

4.1. Uji Chow

Berdasarkan hasil metode Uji *Chow Test* menunjukkan nilai probabilitas dari *Cross-Section Chi-Square* sebesar $0.0000 < 0.05$, H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya apabila pada *Chow test* H_0 ditolak, maka dilanjutkan dengan *Hausman Test*.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	264.300485	(433,1298)	0.0000
Cross-section Chi-square	7795.547281	433	0.0000

Sumber: output regresi EViews 9, 2019

4.2. Uji Hausman

Berdasarkan hasil estimasi model dengan metode *Fixed Effect* dan *Random Effect*, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan pengujian *Hausman Test*. Uji *Hausman* dilakukan untuk memilih kesesuaian model menggunakan *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	39.703743	4	0.0000

Sumber: output regresi EViews 9, 2019

Hasil dari *Hausman Test* menunjukkan nilai probabilitas dari *Cross-Section Random* sebesar $0.0000 < 0.05$, H_0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa model terbaik adalah *Fixed Effect Model*. Kedua hasil pengujian menunjukkan *Fixed Effect Model*, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 3. Kesimpulan Hasil Uji Chow Test dan Hausman Test

Method	Effect Test	Prob.	Hyphotesis	Conclusion
Chow Test	Cross-Section Chi-Square	0.0000	H_0 Rejected	Fixed Effect Model
Hausman Test	Cross-Section Random	0.0000	H_0 Rejected	Fixed Effect Model

Sumber: output regresi EViews 9, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi *Fixed Effect Model* yang digunakan dalam penelitian ini maka pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di kabupaten/kota di Indonesia diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Kesimpulan Pengaruh Variabel Independen Terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Dependen: Tingkat Kemiskinan				
Variabel Independen	Koefisien	Prob.	Hipotesa	Kesimpulan
Dana Bagi Hasil	-4.45E-07	0.1680	Ha Ditolak	Tidak Signifikan
Dana Alokasi Khusus	3.40E-07	0.4739	Ha Ditolak	Tidak Signifikan
Dana Desa	-7.10E-06	0.0000	Ha Diterima	Signifikan
Produk Domestik Regional Bruto	-5.00E-05	0.0022	Ha Diterima	Signifikan
<i>R-Squared</i>	0.989848			
<i>Adjusted R-Squared</i>	0.986431			
<i>F-Statistic</i>	289.6200			
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0.000000			

Sumber: output regresi EViews 9, 2019

4.3. Pembahasan

4.3.1. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan nilai dari *Adjusted R-Squared* sebesar 0.9864 atau 98.64%. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 98.64%, sisanya sebesar 1.36% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Serta model dapat dikatakan *Goodness of Fit*.

4.3.2. Uji Simultan (*F-Test*)

Berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan nilai dari *Prob (F-Statistic)* sebesar $0.0000 < 0.05$, yang artinya H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan, seluruh variabel independen yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, dan Produk Domestik

Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

4.3.3. Uji Parsial (*T-Test*)

Pengaruh DBH terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan probabilitas dari Dana Bagi Hasil sebesar $0.1680 > 0.05$, H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa variabel DBH memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasu *et al* (2019), yang menunjukkan hasil DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan artinya apabila DBH meningkat akan menurunkan angka kemiskinan. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Seharusnya DBH sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan atau program pembangunan seperti meningkatkan sarana dan prasarana publik sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah.

Pengaruh DAK terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan probabilitas dari Dana Alokasi Khusus sebesar $0.4739 > 0.05$, H_a ditolak. Dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sejalan dengan penelitian Jolianis (2016) yang meneliti mengenai Analisis Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel *Intervening*, dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Artinya semakin tinggi DAK yang diterima oleh pemerintah daerah belum dapat mengurangi jumlah penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. DAK yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk program pengentasan kemiskinan belum dapat menurunkan tingkat kemiskinan di daerah. Sehingga ke depan diharapkan

Pemerintah dapat mengevaluasi penggunaan DAK agar kebijakan DAK selanjutnya dapat lebih efektif untuk pengentasan kemiskinan di daerah.

Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan probabilitas dari Dana Desa sebesar $0.0000 < 0.05$, H_a diterima. Maka, Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien dari Dana Desa adalah negatif, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Abdullah (2017) yang melakukan penelitian mengenai analisis ekonomi kebijakan Dana Desa terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung. Dalam penelitian tersebut menunjukkan variabel Dana Desa berpengaruh terhadap kemiskinan desa di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2016. Serta sejalan dengan penelitian Nafiudin (2018) yang telah meneliti mengenai Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang dimana dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa Dana desa sudah mampu mengurangi angka kemiskinan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa program dana desa mempunyai dampak untuk mempermudah mobilitas masyarakat, saluran irigasi semakin baik yang bisa meningkatkan hasil panen, bertambahnya pengetahuan dan terciptanya kesadaran masyarakat. Dana Desa sudah mampu mengurangi angka kemiskinan, meskipun Dana Desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dari pada untuk pemberdayaan masyarakat.

Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan probabilitas dari PDRB sebesar $0.0022 < 0.05$, H_a diterima. Maka Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai koefisien dari PDRB adalah negatif, maka dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut

sejalan dengan penelitian Ulfa (2015), dimana PDRB berpengaruh signifikan dengan elastisitas negatif terhadap jumlah kemiskinan yang berarti meningkatnya PDRB akan menurunkan jumlah kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang telah dilakukan Silastri (2017) yang menunjukkan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana semakin tinggi PDRB maka semakin tinggi pula tingkat pengeluaran dan permintaan agregat sehingga dapat meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapatkan dari penelitian terhadap pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Dana Bagi Hasil, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. DBH tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia
2. DAK tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia
3. Dana Desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia.
4. PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia.

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis adalah *pertama*, pengalokasian Dana Desa kepada pemerintah kabupaten dan kota mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan, sehingga perlu terus adanya dukungan kebijakan dari pemerintah dalam pemanfaatan Dana Desa agar dana dapat digunakan secara optimal dan terarah bagi kesejahteraan masyarakat wilayahnya. *Kedua*, diharapkan setiap pemerintah daerah hendaknya mendorong dan memacu peningkatan PDRB sehingga tingkat kemiskinan di wilayahnya

dapat terus diturunkan. *Ketiga*, untuk peneliti berikutnya dapat menambah variabel lain seperti penerimaan daerah lainnya maupun dapat menggunakan variabel non keuangan seperti tingkat pengangguran, serta dapat memperluas cakupan pada objek penelitian dan memperpanjang rentang waktu penelitian.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2019). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2014-2018*.
- Chambers, Robert. (1983). *Rural Development : Putting the Last First*. London. Longman Group Ltd.
- Giovanni, Ridzky. (2018). *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016*. Universitas Negeri Semarang.
- Halim, Abdul. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. UGM.
- Jolianis. (2016). *Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening*. Sumatera Barat. STKIP PGRI.
- KOMPAK. (2017). *Analisa Kebijakan Dana Desa dan Penanggulangan Kemiskinan*. Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia.
- Nafiudin, Muhammad. (2018). *Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan: Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang*.
- Rasu, K.J.E et al. (2019). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado*. Universitas Sam Ratulangi.
- Santosa, Budi. (2013). *Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia*.
- Sari, Intan Mala dan M. Faisal Abdullah. (2017). *Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Saskia. (2014). *Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Tenggara*. Universitas Hassanudin.

- Silastri, Novri. (2017). *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi*. Universitas Riau.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua)*. Yogyakarta. STIM YKPN.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi pertama. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Suparmako. (2011). *Keuangan Negara*. Edisi keenam. BPFE. Yogyakarta.
- Ulfa, Nurul Amalia. (2015). *Pengaruh PDRB dan PAD Terhadap Tingkat Kemiskinan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) IV Jawa Timur*.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.